

BAB II

MAKAN BERGIZI GRATIS DAN IMPLIKASINYA

2.1 Kebijakan Gizi Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang begitu disorot publik, termasuk melalui perbincangan yang ramai di media sosial TikTok sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang pada halaman 10 - 15, diperlukan tinjauan yang lebih mendalam mengenai akar persoalan gizi yang melandasi lahirnya kebijakan ini serta bagaimana implementasinya dijalankan secara kelembagaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

2.1.1 Masalah Gizi dan Stunting sebagai Latar Kebijakan

Persoalan gizi buruk dan stunting pada anak bukan sekadar isu kesehatan jangka pendek, melainkan persoalan yang berdampak panjang terhadap kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Data terbaru menunjukkan bahwa persoalan ini masih jauh dari tuntas: hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari Kementerian Kesehatan RI mencatat prevalensi stunting nasional berada di angka 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jauh dari target pemerintah sebesar 14 persen. Dengan demikian, kebijakan sebelumnya bukan tidak menghasilkan kemajuan, tetapi efektivitasnya belum cukup untuk memenuhi target nasional. (Kemenkes, 2025). Khusus di DKI Jakarta, lokasi penelitian ini dilakukan, prevalensi stunting menurut SKI 2023 tercatat sebesar 17,6 persen memang berada di bawah rata-rata nasional, namun tetap jauh dari target penurunan yang dicanangkan pemerintah. Stagnansi angka ini menjadi sorotan, sebagaimana dikemukakan pakar gizi Ali Khomsan yang menyoroti bahwa alokasi anggaran puluhan triliun rupiah untuk program stunting belum sebanding dengan hasil penurunan yang dicapai. (detikhealth, 2024)

Victora et al. (2008) di dalam jurnal *The Lancet* menemukan bahwa kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan sepenuhnya di kemudian hari, sehingga pada akhirnya menurunkan produktivitas dan modal manusia (human capital) suatu populasi secara jangka panjang..

Sebelum hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah sesungguhnya telah menjalankan sejumlah program percepatan penurunan stunting, namun implementasinya dinilai belum optimal. Kajian Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI, 2024) menyoroti bahwa strategi penanganan stunting selama ini kurang sejalan dengan pendekatan berbasis bukti sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang seharusnya berfokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun dan bukan pada anak yang sudah duduk di bangku sekolah. Data Kementerian PPN/Bappenas dalam Laporan Indeks Ketahanan Pangan dan Status Gizi (IKPS) 2018-2019 bahkan menunjukkan bahwa intervensi gizi spesifik pada periode 1.000 HPK hanya berkontribusi 30 persen terhadap penurunan stunting, sementara 70 persen sisanya justru ditentukan oleh intervensi gizi sensitif seperti sanitasi, akses air bersih, dan kondisi sosial ekonomi keluarga aspek yang selama ini kurang tergarap dalam program-program yang berjalan.

Salah satu program andalan sebelum MBG, yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang banyak dibiayai melalui Dana Desa, juga menghadapi kendala serupa di tingkat pelaksanaan. Penelitian implementasi kebijakan PMT berbasis Dana Desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, misalnya, menemukan bahwa program tersebut telah berjalan namun belum optimal, dengan persoalan utama pada

penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat sasaran, serta lemahnya koordinasi antarpihak (Wati et al., 2026). Di beberapa daerah, hasilnya bahkan kontraproduktif: studi di Desa Babirik Hulu dan Sungai Janjam, Kalimantan Selatan, mencatat bahwa menu PMT yang monoton membuat anak enggan mengonsumsinya, sehingga angka stunting di wilayah tersebut justru bertambah alih-alih menurun (Handayani & Dharma, 2026). Secara kuantitatif, penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan turut memperkuat gambaran ini: program-program berbasis Dana Desa meliputi PMT, bantuan langsung tunai, dan program ketahanan pangan secara kolektif hanya mampu menjelaskan sekitar 7 persen variasi prevalensi stunting, menunjukkan keterbatasan daya ungkit program-program tersebut sebelum MBG diluncurkan (Ardella & Ariyanto, 2025).

Kerangka berpikir inilah yang mendasari argumentasi pemerintah dalam merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan gizi berskala nasional. Sebagaimana disampaikan pihak Sekretariat Presiden, program ini secara eksplisit diposisikan bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebagai bentuk penanaman modal jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa (Safitri, 2025). Perpres Nomor 83 Tahun 2024 kemudian menjadi instrumen hukum yang menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kelembagaan konkret, yaitu pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan agenda pemenuhan gizi nasional.

2.1.2 Badan Gizi Nasional dan Implementasi MBG

Dalam lanskap studi internasional, kebijakan semacam MBG dikenal luas sebagai *school feeding programs* (SFP), yaitu program pemberian makanan di lingkungan sekolah yang bertujuan mengurangi rasa lapar jangka pendek, memperbaiki status gizi dan

kognisi anak, sekaligus menjadi bentuk transfer pendapatan bagi keluarga penerima manfaat. Tinjauan yang dilakukan Jomaa et al. (2011) terhadap berbagai studi SFP di negara berkembang menemukan bahwa program semacam ini secara konsisten memberikan dampak positif terhadap asupan energi dan status mikronutrien anak, meskipun besaran dampaknya sangat bergantung pada kualitas menu, keteraturan distribusi, dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah program pemberian makanan di sekolah tidak ditentukan semata oleh besarnya cakupan atau anggaran yang dialokasikan, melainkan oleh sejauh mana aspek teknis pelaksanaannya dapat dijaga secara konsisten dan bermutu.

Temuan tersebut relevan untuk membaca tantangan implementasi MBG di Indonesia. Data yang telah dipaparkan pada latar belakang menunjukkan bahwa di balik cakupan anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp268 triliun pada tahun 2026 (antaranews.com, 2026). Badan Gizi Nasional masih menghadapi berbagai persoalan teknis, mulai dari indikasi monopoli pengelolaan dapur, minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal (Tempo, 2025) hingga persoalan *food waste* akibat menu yang tidak sesuai selera siswa. Komara et al. (2025) turut menyoroti persoalan pemborosan pangan ini sebagai salah satu dilema struktural dalam pelaksanaan MBG, yang sejalan dengan kekhawatiran Jomaa dkk. (2011) bahwa kualitas dan penerimaan menu oleh anak merupakan prasyarat penting agar tujuan gizi dari sebuah program pemberian makanan sekolah dapat benar-benar tercapai, bukan sekadar terdistribusi secara administratif. Rangkaian persoalan teknis inilah yang kemudian menjadi materi perbincangan luas di media sosial, termasuk TikTok, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

2.2 TikTok dan Perilaku Konsumsi Informasi Remaja/Generasi Z di Indonesia

Persoalan teknis MBG yang muncul di lapangan tidak akan berdampak luas terhadap opini publik apabila tidak ada saluran yang mampu menyebarkannya secara masif kepada khalayak, khususnya kepada pelajar sebagai penerima manfaat langsung program ini. Dalam konteks inilah TikTok menempati posisi sentral, karena platform tersebut merupakan kanal informasi yang paling banyak digunakan oleh remaja dan Generasi Z di Indonesia saat ini.

2.2.1 TikTok sebagai Sumber Informasi Utama Remaja

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, Survei Profil Internet Indonesia 2025 yang dirilis APJII mencatat TikTok sebagai media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia dengan angka 35,17%, jauh melampaui YouTube, Facebook, Instagram, maupun X/Twitter, dengan pertumbuhan yang paling signifikan dibandingkan platform lain (Kompas Cyber, 2025). Pergeseran ini menandakan adanya perubahan pola konsumsi media di mana media sosial, khususnya TikTok, mulai menggantikan posisi media massa konvensional seperti televisi dan radio sebagai rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkini (GoodStats, 2026). Dominasi ini semakin kuat di kalangan Generasi Z, kelompok usia dengan populasi pengguna internet terbesar di Indonesia, di mana sebanyak 79,4 persen di antaranya aktif menggunakan TikTok dan hampir seperempatnya menjadikan platform ini sebagai sumber informasi utama, mengungguli YouTube maupun Instagram (GoodStats Data, 2025).

Fenomena ini menjelaskan mengapa pelajar SMA, sebagai bagian dari Generasi Z sekaligus penerima langsung program MBG, menjadi kelompok yang paling intensif terpapar berbagai bentuk informasi mengenai program tersebut di TikTok, baik konten yang

bersifat positif maupun negatif. Tingginya intensitas penggunaan ini menjadikan TikTok bukan sekadar sarana hiburan bagi siswa, melainkan juga kanal utama pembentukan pengetahuan dan opini mereka terhadap isu-isu kebijakan publik yang menyentuh kehidupan sehari-hari, termasuk kualitas makanan yang mereka terima di sekolah.

2.2.2 Karakteristik Konsumsi Konten Generasi Z di TikTok

Untuk memahami mengapa TikTok begitu efektif menjangkau siswa secara masif, diperlukan pemahaman atas karakteristik generasi penggunanya. Generasi Z merupakan generasi dengan tingkat konsumsi media sosial tertinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, sekaligus generasi yang tumbuh sepenuhnya dalam lingkungan digital sejak masa kanak-kanak, sehingga keterhubungan dengan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka (GWI, 2026). Karakteristik ini menjelaskan mengapa isu-isu kebijakan publik seperti MBG dapat menjangkau siswa secara masif tanpa perlu upaya pencarian aktif dari mereka.

Mekanisme penjangkauan tersebut tidak lepas dari cara kerja algoritma TikTok itu sendiri. Bhandari & Bimo (2022) melalui penelitian kualitatifnya terhadap pengguna TikTok menemukan bahwa platform ini menghadirkan apa yang mereka sebut sebagai *algorithmized self*, yaitu kondisi ketika sistem rekomendasi *For You Page* secara aktif menyodorkan konten berdasarkan pola perilaku pengguna, bukan berdasarkan jaringan pertemanan atau akun yang diikuti secara sengaja. Mekanisme inilah yang menjelaskan bagaimana video-video mengenai MBG, baik ulasan positif maupun insiden negatif seperti kasus keracunan, dapat menjangkau siswa secara berulang meski mereka tidak secara aktif mencari informasi tersebut, sejalan dengan konsep *accidental exposure* yang telah

dibahas pada bagian sebelumnya (Peter & Olson, 2013). Herring (2007) menambahkan bahwa karakteristik komunikasi bermedia komputer, termasuk pada platform video pendek seperti TikTok, bersifat multimodal dan mudah disebarluaskan ulang (reshareable), sehingga sebuah unggahan tunggal berpotensi menjangkau audiens dalam skala yang jauh lebih besar dan berulang dibandingkan komunikasi bermedia konvensional. Karakteristik gabungan inilah, yaitu intensitas penggunaan Generasi Z yang tinggi dan mekanisme algoritmik yang repetitif, yang menjadikan TikTok kanal yang sangat efektif sekaligus rawan dalam membentuk persepsi siswa terhadap program MBG.

2.3 Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah di Media Sosial

Derasnya arus informasi mengenai MBG di TikTok, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, pada akhirnya bermuara pada terbentuknya opini publik yang beragam, mulai dari dukungan hingga kritik tajam terhadap pelaksanaan program. Untuk memahami bagaimana proses tersebut berlangsung, diperlukan tinjauan atas dua hal: bagaimana isu kebijakan dibingkai (framing) hingga menjadi viral, dan bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang kritik serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

2.3.1 Viralitas dan Framing Isu Kebijakan di Media Sosial

Entman (1993) menjelaskan bahwa framing pada dasarnya adalah proses menyeleksi aspek tertentu dari suatu realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam sebuah pesan, sedemikian rupa sehingga mendorong definisi masalah, interpretasi sebab-akibat, penilaian moral, dan bahkan rekomendasi penyelesaian tertentu atas isu yang diberitakan. Prinsip ini tampak jelas pada berbagai unggahan mengenai MBG yang telah dipaparkan pada latar belakang, misalnya video akun Metro TV dan Kompas.com yang mengangkat kasus keracunan massal di Cianjur. Dengan menonjolkan aspek insiden keracunan dan status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan otoritas kesehatan, konten tersebut secara

tidak langsung membingkai MBG sebagai program yang berisiko dan bermasalah, sebuah bingkai yang kemudian mudah diterima secara luas karena telah mendapat legitimasi dari institusi resmi.

Sejalan dengan hal tersebut, studi (Nurprianso & Adhijani, 2026) yang dipublikasikan di LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren menemukan bahwa konten keracunan MBG yang viral di TikTok dengan jutaan tayangan mampu memicu reaksi emosional yang beragam dari khalayak, termasuk kalangan siswa sebagai kelompok yang paling terdampak langsung oleh isu tersebut. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa framing yang terbentuk dalam sebuah konten viral tidak berhenti sebagai informasi pasif, melainkan turut membentuk cara pandang dan respons emosional audiens terhadap objek yang diberitakan, dalam hal ini adalah penilaian terhadap kualitas dan keamanan program MBG itu sendiri.

2.3.2 Media Sosial sebagai Ruang Kritik dan Pengawasan Publik

Di luar fungsinya sebagai kanal penyebaran informasi, media sosial juga berperan sebagai ruang partisipasi warga dalam mengawasi kinerja pemerintah. Loader & Mercea (2011) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan warga untuk mengangkat, membingkai, dan memperdebatkan berbagai isu publik secara lebih terbuka dibandingkan era media massa konvensional, sekaligus menjadi sarana yang berpotensi menantang kekuasaan dan kepentingan institusional yang telah mapan. Dalam konteks MBG, fungsi tersebut tampak dari banyaknya unggahan warganet maupun akun media yang secara terbuka mengkritik persoalan teknis program, mulai dari kualitas menu hingga dugaan penyimpangan anggaran, sebagaimana tercermin dari unggahan akun Tempo mengenai dugaan *markup* bahan baku MBG yang telah dibahas pada latar belakang.

Beberapa kajian berbasis data juga telah berupaya memetakan secara kuantitatif bagaimana sentimen publik terhadap MBG terbentuk di media sosial. Haerani (2026) yang menganalisis lebih dari sepuluh ribu

komentar warganet di platform X menggunakan model *Gated Recurrent Unit* menemukan bahwa mayoritas tanggapan publik terhadap MBG sesungguhnya bersifat positif, meski proporsi sentimen negatif tetap signifikan. Sebaliknya, Rahmatullah et al. (2025) yang menganalisis data serupa dengan algoritma Naïve Bayes justru menemukan kecenderungan sentimen negatif yang lebih dominan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap MBG di media sosial bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh periode pengambilan data, terutama saat bertepatan dengan munculnya insiden teknis tertentu seperti kasus keracunan. Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya melihat secara empiris sejauh mana terpaan informasi digital tersebut benar-benar berpengaruh pada level individu siswa, bukan hanya pada level wacana publik secara agregat.